

RINGKASAN

**MUHAMMAD ALIF
RAHMAN WIJAYA**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI BPN KOTA LHOKSEUMAWE

(Dr. Elidar Sari S.H., M.H dan Dr. Hadi Iskandar
S.H., M.H)

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam kasus kehilangan sertifikat tanah merupakan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang kehilangan sertifikatnya. Sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting dan berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, sehingga kehilangan sertifikat tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan administratif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus kehilangan sertifikat tanah dan Apakah hambatan dan upaya dalam pembuatan sertifikat pengganti dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Secara normatif hukum di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur prosedur pendaftaran tanah.

Hasil dari penelitian adalah BPN memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara mengurus sertifikat tanah dan menjaga dokumen penting. Tujuan langkah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan menghindari sengketa di masa depan dan Hambatan dalam pembuatan sertifikat pengganti biasanya meliputi kendala administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung, proses verifikasi yang memakan waktu, atau adanya pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama.

Kesimpulan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah melalui prosedur yang diatur oleh hukum. Perlindungan ini mencakup, penggantian sertifikat yang hilang BPN membantu penerbitan sertifikat baru untuk menggantikan yang hilang dan Hambatan dalam pembuatan sertifikat pengganti biasanya meliputi kendala administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung, proses verifikasi yang memakan waktu, atau adanya pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Selain itu, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum juga dapat memperlambat proses.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kehilangan Sertifikat, Tanah

ABSTRAK

Muhammad Alif Rahman Wijaya : Legal Protection Against the Loss of Land Title Certificates at the BPN Office in Lhokseumawe City

(Dr. Elidar Sari., S.H.,M.H. Dan Dr. Hadi Iskandar., S.H.,M.H.)

Legal protection of land rights in the case of lost land certificates is a mechanism regulated by legislation to ensure legal certainty and fairness for landowners who lose their certificates. A land certificate is an important document that serves as legal proof of land ownership or possession, so the loss of such a certificate can lead to various legal and administrative issues.

The problem formulation in this research is how the legal protection provided by the National Land Agency (BPN) of Lhokseumawe City addresses cases of lost land certificates, and what are the obstacles and efforts in issuing replacement certificates, as well as the solutions.

This research uses a juridical-empirical approach, a qualitative method with field data collection techniques, including observation, interviews, documentation, and literature review. In terms of normative law in Indonesia, Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration regulate the land registration procedure.

The research findings indicate that BPN provides counseling and assistance to the public on how to manage land certificates and protect important documents. The goal of this effort is to provide legal certainty for landowners and prevent future disputes. Obstacles in the issuance of replacement certificates typically include administrative issues, such as incomplete supporting documents, time-consuming verification processes, or the existence of parties claiming rights over the same land. In conclusion, the National Land Agency (BPN) of Lhokseumawe City offers legal protection for citizens who lose their land certificates through procedures regulated by law.

This protection includes the replacement of lost certificates, with BPN assisting in the issuance of new certificates to replace the lost ones. Obstacles in the issuance of replacement certificates generally involve administrative challenges, such as incomplete supporting documents, lengthy verification processes, or competing claims over the same land. Additionally, a lack of public understanding of legal procedures can also delay the process.

Keywords: Legal Protection, Loss of Certificate, Land